

Efektivitas Strategi Pengelolaan Keuangan dalam Mendukung Penyusunan Program Kerja di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Hans Silvanus Andoi^{1*}, Manuel August Todingbua², Johannes Baptista Halik³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

hansandoi01@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan keuangan yang efektif dalam penyusunan program kerja di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap empat informan kunci. Analisis data dilakukan dengan metode tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keuangan yang efektif meliputi: perencanaan anggaran yang matang, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi berkala, keterlibatan stakeholder, pengelolaan risiko keuangan, serta pengendalian anggaran. Hambatan utama yang diidentifikasi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi keuangan, sistem pengelolaan yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan anggaran, prosedur birokratis yang memakan waktu, serta perubahan anggaran yang tidak terduga. Efektivitas strategi diukur melalui kesesuaian antara anggaran dan realisasi, pencapaian target program, efisiensi penggunaan dana, tingkat kepatuhan terhadap prosedur, transparansi, kepuasan stakeholder, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi pengelolaan keuangan yang terstruktur dan partisipatif untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas penyusunan program kerja di pemerintah daerah.

Kata kunci: strategi, pengelolaan keuangan, efektivitas, program kerja, pemerintah daerah

Abstract

This study aims to analyze effective financial management strategies in the preparation of work programs at the Secretariat of BPPKAD, Central Papua Province. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving four key informants. The data were analyzed using thematic analysis. The findings reveal that effective financial management strategies include meticulous budget planning, transparency and accountability in financial administration, regular monitoring and evaluation, stakeholder involvement, financial risk management, and budgetary control. Several challenges were identified, such as limited human resources with adequate financial competence, a management system that is not yet fully integrated, budget constraints, time-consuming bureaucratic procedures, and unexpected budget changes. The effectiveness of financial management was assessed through indicators such as alignment between budget and realization, achievement of program targets, efficiency in fund utilization, compliance with procedures and policies, transparency, stakeholder satisfaction, and the use of technology in financial management. These results highlight the importance of structured and participatory financial management strategies in enhancing accountability, efficiency, and the quality of work program preparation within local government institutions.

Keywords: strategy, financial management, effectiveness, work program, local government.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Pada level pemerintah daerah, efektivitas pengelolaan keuangan berpengaruh langsung terhadap kualitas penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kinerja keuangan yang buruk sering kali mengakibatkan program kerja tidak tepat sasaran, keterlambatan realisasi anggaran, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Pratama & Fikri, 2020; Yunus, 2021).

Sebagai daerah otonom baru, Provinsi Papua Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam konsolidasi kelembagaan, termasuk pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD). Sekretariat BPPKAD memiliki peran strategis dalam menyusun program kerja tahunan yang harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya integrasi sistem keuangan daerah, serta proses birokrasi yang lamban (Kuswandi, 2021; Sari & Putra, 2021).

Fenomena keterlambatan serapan anggaran juga menjadi isu nasional. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rata-rata realisasi belanja daerah secara nasional pada triwulan III tahun 2023 baru mencapai 54,3% dari APBD, jauh dari target ideal 75% (Kementerian Keuangan RI, 2023). Hal ini menegaskan adanya persoalan dalam perencanaan dan strategi pengelolaan keuangan yang berimplikasi langsung pada efektivitas program kerja pemerintah daerah.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2023

Indikator	Target (%)	Realisasi Nasional (%)	Realisasi Papua Tengah (%)
Belanja Daerah (Triwulan III)	75%	54,3%	48,7%*
Serapan Program Prioritas	≥70%	56,1%	45,2%*

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2023), diolah peneliti.

Data tersebut memperlihatkan bahwa Papua Tengah berada di bawah rata-rata nasional, sehingga strategi pengelolaan keuangan yang

efektif menjadi kebutuhan mendesak agar penyusunan program kerja dapat berjalan sesuai prioritas pembangunan daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada efektivitas pencapaian program kerja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya BPPKAD Papua Tengah, dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pengelolaan keuangan yang efektif dapat diterapkan dalam penyusunan program kerja di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung penyusunan program kerja di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah?
3. Bagaimana mengukur efektivitas pengelolaan keuangan dalam penyusunan program kerja di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah?

TINJAUAN LITERATUR

Strategi Pengelolaan Keuangan

Strategi pengelolaan keuangan merupakan serangkaian rencana sistematis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan (Pabane et al., 2025; Pammai et al., 2025). Menurut Gitman dan Zutter (2019), strategi keuangan mencakup alokasi modal, pengendalian biaya, serta manajemen risiko untuk memastikan keberlanjutan keuangan organisasi. Lebih lanjut, Brigham dan Houston (2022) menekankan bahwa strategi pengelolaan keuangan melibatkan perencanaan, pengelolaan aset dan kewajiban, serta pemantauan kinerja keuangan agar organisasi tetap likuid, solvabel, dan tumbuh.

Dalam konteks sektor publik, strategi pengelolaan keuangan harus berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan anggaran (Halim & Abdullah, 2021). Efektivitas strategi keuangan di pemerintahan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, koordinasi antarunit, serta pemanfaatan teknologi informasi (Wijaya, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang strategis bukan hanya berfokus pada administrasi anggaran, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang (Pidjer et al., 2025).

Program Kerja

Program kerja adalah kumpulan kegiatan terstruktur yang disusun berdasarkan tujuan organisasi dalam periode tertentu. Menurut Purwanto (2020), program kerja berfungsi sebagai pedoman operasional yang mencakup aktivitas, tujuan, waktu pelaksanaan, serta indikator keberhasilan. Dengan adanya program kerja, organisasi memiliki arah yang jelas dalam pemanfaatan sumber daya.

Dalam organisasi publik, penyusunan program kerja menjadi instrumen utama untuk menjabarkan kebijakan pemerintah ke dalam aktivitas nyata (Safitri, 2022). Lebih lanjut, PP No. 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa program kerja harus selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan serta memanfaatkan sumber daya secara efisien. Evaluasi program kerja berfungsi untuk memastikan ketercapaian sasaran dan sebagai dasar penyusunan anggaran periode berikutnya (Sombo et al., 2025).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan (PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020). Prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi (Pratama & Fikri, 2020).

Tantangan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih berkaitan dengan rendahnya serapan anggaran, kurangnya kompetensi SDM, serta keterbatasan integrasi sistem informasi keuangan (Yunus, 2021). Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem informasi pengelolaan daerah (SIPD) dan e-budgeting, terbukti mampu

meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran (Anita Wulandari, 2017; Nugroho & Wibowo, 2022).

Dengan demikian, strategi pengelolaan keuangan yang efektif harus memadukan aspek perencanaan anggaran yang matang, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pengendalian berbasis teknologi informasi untuk mendukung kualitas program kerja pemerintah daerah (Sangganafa et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami strategi pengelolaan keuangan dalam penyusunan program kerja di lingkungan pemerintah daerah secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna, proses, dan dinamika yang terjadi di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah, bukan menguji hubungan kausalitas antar variabel. Sejalan dengan pendapat Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif tepat digunakan untuk mengkaji fenomena sosial secara holistik melalui interaksi dengan partisipan yang terlibat langsung.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah yang memiliki keterkaitan dengan proses penyusunan program kerja dan pengelolaan keuangan. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini tidak melibatkan seluruh populasi, melainkan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2015). Informan utama terdiri dari empat orang yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan, yaitu Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian Perencanaan, serta dua staf teknis yang terlibat dalam penyusunan program kerja. Jumlah informan ini dinilai memadai karena dalam penelitian kualitatif, kedalaman informasi lebih diutamakan dibandingkan jumlah responden (Guest et al., 2020).

Lokasi penelitian berada di Sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah yang berkedudukan di Nabire sebagai ibu kota provinsi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis BPPKAD dalam memastikan tata kelola keuangan daerah yang efektif serta fakta bahwa Papua Tengah merupakan provinsi baru

yang masih menghadapi tantangan konsolidasi kelembagaan. Penelitian dilaksanakan selama April 2025 hingga Juni 2025, mencakup tahap observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, serta analisis data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam (in-depth interviews), dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami situasi kerja dan pola koordinasi antarpegawai dalam pengelolaan keuangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas. Dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran, dokumen program kerja, serta regulasi keuangan daerah digunakan untuk memperkuat validitas temuan. Triangulasi sumber dilakukan guna memastikan keabsahan data, sesuai dengan rekomendasi Miles, Huberman, dan Saldaña (2019).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik (thematic analysis), yaitu teknik analisis dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi tema-tema yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2019). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari transkripsi data wawancara, pemberian kode (coding), pengelompokan kode menjadi sub-tema, hingga merumuskan tema utama yang menggambarkan strategi pengelolaan keuangan, hambatan, serta indikator efektivitas. Teknik ini dipilih karena fleksibel dan mampu mengungkap makna mendalam dari data yang kompleks.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi pengelolaan keuangan yang efektif dalam penyusunan program kerja di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta indikator efektivitas yang relevan bagi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan Penelitian

Responden dalam penelitian ini terdiri dari empat informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan program kerja di Sekretariat BPPKAD Provinsi

Papua Tengah. Adapun profil informan dapat dilihat pada **Tabel 2** berikut:

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Bekerja (Tahun)
I1	Kepala Sekretariat BPPKAD	S.ST	12
I2	Kepala Subbagian Perencanaan	S.E.	10
I3	Staf Teknis Perencana	S.Kom	6
I4	Staf Teknis Administrasi Keuangan	S.T., M.M	8

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Data di atas menunjukkan bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang cukup beragam, namun semuanya memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan program kerja.

Hasil Wawancara

Wawancara mendalam menghasilkan sejumlah temuan terkait strategi pengelolaan keuangan, faktor penghambat, serta indikator efektivitas. Beberapa kutipan penting ditampilkan dalam **Tabel 3** untuk memperkuat temuan penelitian.

Tabel 3. Kutipan Wawancara Responden

Tema Utama	Kutipan Responden
Strategi Pengelolaan	“Untuk mendukung penyusunan program kerja, kita harus pastikan ada perencanaan yang matang. Anggaran harus bisa diprediksi dan dipantau secara berkala.” (I1)
Hambatan	“Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan SDM dengan pemahaman keuangan yang baik, ditambah sistem yang belum terintegrasi.” (I1)
Efektivitas Pengelolaan	“Biasanya kami melihat kesesuaian antara anggaran dan realisasi, apakah program bisa selesai tepat waktu dan sesuai target.” (I2)
Perubahan Anggaran	“Hambatan yang sering muncul adalah perubahan anggaran yang tidak terduga, ini bisa mengganggu proses kerja.” (I3)
Transparansi dan Akuntabilitas	“Keuangan harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, dengan laporan yang jelas dan dapat diakses.” (I4)

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Kutipan ini memperlihatkan adanya kesadaran dari para informan mengenai pentingnya strategi perencanaan yang matang, tantangan birokratis, serta perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Analisis Tematik

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Tiga tema utama berhasil diidentifikasi, yaitu: strategi pengelolaan keuangan, faktor penghambat, dan indikator efektivitas. Rincian hasil analisis ditunjukkan dalam **Tabel 4**.

Tabel 4. Hasil Analisis Tematik Penelitian

Tema Utama	Sub-Tema	Indikator/Temuan
Strategi Pengelolaan	- Perencanaan anggaran matang- Transparansi & akuntabilitas- Monitoring berkala- Keterlibatan stakeholder- Pengendalian risiko	Anggaran realistis, laporan terbuka, evaluasi semester, partisipasi lintas unit.
	- Keterbatasan SDM- Sistem belum terintegrasi- Keterbatasan anggaran- Prosedur birokratis- Perubahan anggaran	Koordinasi sulit, revisi anggaran sering, keterlambatan pelaksanaan program.
Indikator Efektivitas	- Kesesuaian anggaran vs realisasi- Pencapaian target program- Efisiensi penggunaan dana- Kepatuhan prosedur- Pemanfaatan teknologi	Target program tercapai tepat waktu, transparansi meningkat, penggunaan SIPD.

Sumber: Hasil penelitian (2025)

Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi pengelolaan keuangan sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, koordinasi lintas unit, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, tantangan utama masih berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan perubahan anggaran yang tidak terduga.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebelumnya. **Pertama**, strategi pengelolaan keuangan yang

efektif di Sekretariat BPPKAD Papua Tengah mencakup perencanaan anggaran matang, transparansi, monitoring berkala, serta keterlibatan stakeholder. Temuan ini sejalan dengan studi Wijaya (2022) yang menegaskan bahwa efektivitas program kerja di instansi pemerintah bergantung pada perencanaan dan pelaporan yang akuntabel.

Kedua, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan SDM yang berkompoten, keterlambatan birokrasi, dan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. Hambatan ini konsisten dengan penelitian Sari dan Putra (2021) yang menemukan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur menjadi kendala signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ketiga, efektivitas pengelolaan keuangan diukur melalui kesesuaian antara anggaran dan realisasi, pencapaian target program, efisiensi dana, dan pemanfaatan teknologi. Hal ini memperkuat pandangan Braun dan Clarke (2019) bahwa indikator efektivitas dalam manajemen publik harus mencakup dimensi kepatuhan, transparansi, dan kepuasan stakeholder.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa strategi pengelolaan keuangan yang terstruktur dan partisipatif, dengan dukungan teknologi, sangat penting dalam meningkatkan kualitas penyusunan program kerja di pemerintah daerah, khususnya pada instansi baru seperti BPPKAD Provinsi Papua Tengah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keuangan yang efektif dalam penyusunan program kerja di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah meliputi perencanaan anggaran yang matang, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala, keterlibatan stakeholder, serta pengendalian risiko dan anggaran. Strategi tersebut terbukti menjadi landasan penting dalam memastikan kesesuaian anggaran dengan realisasi, pencapaian target program, efisiensi penggunaan dana, serta meningkatnya tingkat kepuasan stakeholder.

Namun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat yang mengurangi efektivitas pengelolaan keuangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi

keuangan, sistem pengelolaan yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan anggaran, prosedur birokratis yang lamban, serta perubahan anggaran yang tidak terduga. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan tata kelola berbasis akuntabilitas terbukti mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa strategi pengelolaan keuangan yang terstruktur, partisipatif, dan didukung oleh teknologi digital menjadi faktor kunci dalam peningkatan kualitas penyusunan program kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat diterapkan:

1. **Penguatan Kapasitas SDM:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan manajemen keuangan publik, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital dan sistem keuangan berbasis elektronik.
2. **Integrasi Sistem Keuangan Daerah:** Diperlukan percepatan implementasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)* dan *e-budgeting* secara penuh agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja dapat dilakukan lebih efisien dan transparan.
3. **Reformasi Birokrasi Keuangan:** Penyederhanaan prosedur birokratis melalui digitalisasi layanan administrasi keuangan perlu didorong untuk mengurangi keterlambatan serapan anggaran.
4. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi:** Evaluasi berkala terhadap kesesuaian anggaran dengan realisasi serta pencapaian target program perlu dijadikan mekanisme wajib untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
5. **Kebijakan Fleksibilitas Anggaran:** Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme responsif dalam menghadapi perubahan anggaran yang tidak terduga, agar program kerja tetap dapat berjalan sesuai prioritas pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Wulandari. (2017). Pengelolaan keuangan daerah di era digitalisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 45–57.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2022). *Fundamentals of financial management* (16th ed.). Cengage Learning.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2019). *Principles of managerial finance* (15th ed.). Pearson.
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLOS ONE*, 15(5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2021). *Manajemen keuangan daerah di Indonesia*. UPP STIM YKPN.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan realisasi APBD triwulan III tahun 2023*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kuswandi, W. (2021). Pengelolaan keuangan publik di pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(1), 55–68.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, A., & Wibowo, T. (2022). Digital transformation in regional financial management: Evidence from Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*, 6(1), 25–37.
- Pabane, W., Todingbua, M. A., & Mongan, C. J. (2025). Unlocking Financial Success : How Literacy and Inclusion Shape SME Owners ' Well-Being in Makassar. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 36–

43. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.304>
 Pammai, A., Paridy, A., & Todingbua, M. A. (2025). Financial Sustainability of Culinary SMEs : Examining the Role of Working Capital and Liquidity in Makassar. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 29–36. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.303>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308>
- Pratama, Y., & Fikri, F. (2020). Pengaruh tata kelola keuangan terhadap efektivitas program pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 123–134.
- Purwanto, A. (2020). *Program kerja dalam manajemen organisasi publik*. Kencana.
- Safitri, N. (2022). Penyusunan program kerja dalam organisasi publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 77–89.
- Sangganafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota : Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 22–28. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300>
- Sari, D., & Putra, A. (2021). Strategi pengelolaan keuangan dalam penyusunan program kerja. *Jurnal Manajemen Publik*, 5(2), 101–115.
- Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPSTP Kabupaten Dogiyai). *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 61–69. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990/>
- Wijaya, H. (2022). Analisis strategi pengelolaan keuangan untuk efektivitas program kerja. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(1), 89–102.
- Yunus, M. (2021). Ruang lingkup keuangan daerah dalam perspektif otonomi. *Jurnal Keuangan Negara*, 15(3), 211–225.